

Muhammad Said Alfuraqan

Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan ...

PENGARUH OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Muhammad Said Alfuraqan, Gazali Suyuti

Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin Makassar

Email: muhsaidalfuraqan41@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini tentang pengaruh optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Masalle. Masalah kemudian disusun ke dalam sub masalah atau pernyataan penelitian, yaitu: Bagaimana eksistensi Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa Masalle kec Masalle Kabupaten Enrekang; Bagaimana hambatan dan rintangan pengelolaan badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Masalle; Bagaimana persepsi ketatanegaraan Islam dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Masalle Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Badan Usaha Milik Desa di Masalle kec Masalle kab Enrekang masih terus mengalami perkembangan menuju hasil yang pesat seperti BUMDES yang teras di desa lainnya. Dengan penelitian ini diharapkan agar Pemerintah desa dapat lebih memperhatikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dalam permendes No 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi serta memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa dan anggaran alokasi dana desa dengan pertimbangan kepentingan orang banyak.

Kata Kunci: Pengelolaan usaha; Enrekang; Badan Usaha Milik Desa;

Abstract

This research is about the effect of optimizing the management of Village-Owned Enterprises on the welfare of the Masalle village community. The problem is then arranged into sub-problems or research statements, namely: How is the existence of Village-Owned Enterprises in realizing the welfare of the community in Masalle Village, Masalle District, Enrekang Regency; How are the barriers and obstacles in managing village-owned enterprises in realizing community welfare in Masalle Village; How are the perceptions of the Islamic constitution in the management of Masalle Village-Owned Enterprises This research uses a type of qualitative research, where researchers go directly to the field to collect data through observation, interviews, and documentation? The data source of this research comes from primary data and secondary data. The results of the study show that the existence of Village-Owned Enterprises in Masalle, Masalle, Enrekang, is still experiencing rapid progress towards results like BUMDES that are felt in other villages. With this research, it is hoped that the village government can pay more attention to the management of Village-Owned Enterprises as in the Minister of Decree No. 4 of 2015 concerning the management of Village-Owned Enterprises and it is hoped that the village government and the community can synergize and take advantage of Village-Owned Enterprises and village funds allocation budget with consideration of interests. people.

Keywords: Business Management; Village Owned Enterprises;

A. PENDAHULUAN

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kemandirian daerah guna mendapatkan pendapatan asli desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi.¹

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersediannya sumber daya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.²

Selanjutnya menurut pasal 213 ayat (3) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa sebagian suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.³

Pendirian BUMDES adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktifitas desa yang dilakukan secara koooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, sustainable, oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDES tersebut bisa berjalan secara efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktifitas dan konsumsi masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Dinyatakan dalam undang-undang No.6 tahun 2014 bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat.

Desa Masalle yang memiliki 7 dusun yang sebagian besar masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi pertanian dan peternakan yang masih belum dikelola dengan baik. Dari luas wilayah 24.425 km dan memiliki kurang lebih 4000 jiwa terdiri dari perempuan dan laki-laki, hal inilah yang melatar belakangi di bentuknya BUMDES di Desa Masella kec Masella. Namun dari hasil pengamatan tentang usaha desa masella, mengalami banyak permasalahan dibidang pengambilan modal karna rumitnya pengurusan untuk peminjaman modal dibidang usaha pertanian dan peternakan yang menjadi penghambat majunya usaha BUMDES. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Masalle dengan alasan bahwa desa ini memiliki potensi yang baik dalam hasil pertanian dan peternakan, masyarakat maupun aparatur desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang BUMDES, dan bagaimana cara pengelolaan BUMDES sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan di desa Masalle kec Masalle.

Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: data primer, dimana

¹ Ade Eka Kurniawan. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa* (

² Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang bumdes

³ Samadi dkk. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*

pengumpulan data diperoleh langsung dari narasumber, melalui hasil wawancara, dan apasaja yang disaksikan secara langsung oleh penulis. Adapun data sekunder itu bersumber dari Al'quran, buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penulis.

C. RESHULTS & DISCATION

Eksistensi BUMDES di kalangan masyarakat Enrekang khususnya di desa Masalle kec Masalle kab Enrekang, memiliki banyak peluang untuk mengembangkan potensi sumber daya desa sesuai kebutuhan masyarakat, serta menjadi sentral kebutuhan. Peran BUMDES dalam membangun usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang oleh perekonomian desa yang terarah. Pengembangan serta pengelolaan BUMDES yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangunan terwujudnya perekonomian desa yang sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan. BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga lain ekonomi pada umumnya, hal ini dimaksud agar keberadaan BUMDES dan kinerja BUMDES mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama di desa Masalle.⁴

Berdasarkan hasil peneliti lapangan, maka disimpulkan akhir Eksistensi BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di desa Masalle kabupaten Enrekang masih terus mengalami perkembangan hingga mencapai kemajuan pesat seperti BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang terarah di desa tetangganya yaitu Desa Petongloan yang sudah berjalan seperti pinjaman (SPP), pengelolaan air bersih, dan perdagangan obat-obatan. Hal inilah membuat BUMDES mendapat tempat istimewa di kalangan masyarakat desa Masalle.

Dalam pengelolaan BUMDES ada berapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Masyarakat menganggap bahwa dana BUMDES di anggap uang biasa saja.

Dalam pemahaman masyarakat awam ada yang belum memahami tentang dana BUMDES apalagi belum ada sosialisasi tentang BUMDES, dana BUMDES sehingga masih ada sebagian masyarakat yang menganggap dana BUMDES hanya dana biasa saja, yang mereka anggap uang tersebut adalah uang masyarakat yang diterima tanpa harus di kembalikan oleh mereka kepada pengurus BUMDES sehingga dana simpan pinjam dalam program BUMDES sedikit terhambat. Karna dana yang diperentukkan kepada masyarakat secara bergilir belum berjalan dengan baik, meskipun masih banyak sebagian masyarakat yang menganggap dana BUMDES untuk mereka bukan untuk digulirkan di masyarakat dan ujungnya dana tersebut mengalami kemacetan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Risal⁵ selaku ketua BUMDES, melihat kendala dalam menjalankan program simpan pinjam (SPP) pengurus BUMDES berusaha keras menjelaskan kepada masyarakat hingga bersedia bekerja sama dan saling menguntungkan serta mau membayar uang pinjaman usaha pinjam untuk di gulirkan kepada masyarakat kembali.

- 2) Sumber Daya Manusia Rendah

Salah satu hambatan pengurus desa dan pengurus BUMDES yaitu kurang sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dan berpendidikan akan memperlambat kemajuan perkembangan BUMDES karna perkembangan BUMDES lain di setiap Desa akan terus

⁴. Departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan (PKDSP) fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007 Buku Paduan Dan Pengelolaan Badan Usaha

⁵. Wawancara RISAL (Ketua BUMDES Desa Masalle). Tanggal 23 Agustus 2018.

mengalami kemajuan yang sangat baik karena sumber daya manusia yang berniali tinggi akan mendukung perkembangan suatu program kegiatan BUMDES.

Mengamati hasil paparan wawancara Sekertaris BUMDES Desa Masalle Bapak Salama⁶ bahwa selama pelaksanaan program-program masih kurang pengurus, seperti salah satu bendahara BUMDES yang sudah menikah tidak lagi menetap Di Desa Masalle hingga segala kegiatan BUMDES sedikit mengalami hambatan. Walaupun sudah di ambil alih oleh staf desa tetap saja ada hambatan yang dalam pelaksanaan kegiatan program dana BUMDES karena tidak saja bendahara yang fakum dalam pengurusannya

Rendahnya Sumber Daya Finansial

Menurut Fitry merupakan bendahara BUMDES mengatakan bahwa sumber daya finansial ada yang belum memenuhi dalam pengelolaan BUMDES, hal ini di karnakan dana yang di keluarkan pemerintah daerah masih kurang cukup, tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada, para penengelola berharap dana yang di keluarkan sesuai dengan jumlah masyarakatnya sehingga mampu merperdaya masyarakat dengan lebih baik lagi serta menambah fasilitas yang ada.⁷

Dari hasil wawancara oleh salah satu anggota BUMDES Surdin mengatakan bahwa di lihat dari realita yang terjadi bahwa kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat sebagai pengelola BUMDES akan adanya tanggung jawab atas hewan ternak, terkadang mereka menjual secara diam-diam kemudian melaporkan kepada pengurus BUMDES atau Ketua BUMDES bahwa hewan ternak yang di berikan kepada mereka mati sehingga kita yang merupakan salah satu pengolalah BUMDES juga ikut di rugikan.⁸

3) Anggapan Masyarakat Terhadap Pengelolan Badan Usaha Milik Desa Masalle Kec. Masalle

BUMDES yang ada di desa Masalle sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dapat di raih melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan otonomi desa, hal tersebut telah di lakukan oleh pemerintah desa Masalle dapat dilihat dari program-program yang sudah berjalan seperti simpan pinjam (SPP), dan hewan ternak bagi masyarakat mengalami kendala karena kurang pemahaman masyarakat tentang BUMDES itu sendiri. Pengelolaan air bersih, dan perdagangan obat-obatan, meskipun ada beberapa yang masih perlu diperbaiki program maupun pengurus BUMDES dari segi masalah internal maupun external.

Apa yang telah pemerintah lakukan sudah sangat sejalan dengan ajaran Islam terkhusus ketatanegaraan Islam seperti hal nya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam catatan sejarah Islam, pemerintah dalam membangun masyarakat mengedepankan pembangunan ekonomi guna mensejahterakan rakyat. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa setelah hijrah kaum muhajirin yang merupakan salah satu pilar komunis pembangunan masyarakat madina secara ekonomi secara marjinal. Hal ini dipahami karena kaum muhajirin telah meninggalkan harta benda dan aset-aset ekonomi lainnya di kota mekah sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi sosial antara kaum muhajirin (pendatang) dengan penduduk kota madinah.

Maka kalau di lihat dalam proses kesejatrahan konsep ekonomi pertama yang akan di tegakkan Rasulullah pada saat membangun kota madina adalah retribusi kekayaan, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi di antara masyarakat penyangga kota Madinah. Strategi

⁶ Wawancara SALAMA (Sekertaris Bumdes Desa Masalle), Tanggal, 23 Agustus 2018.

⁷ . Wawancara dengan FITRY (Bendahara Bumdes Desa Masalle) Tanggal 23 Agustus 2018

⁸ . Wawancara dengan SURDIN (Anggota Bumdes Desa Masalle) Tanggal 25 Agustus 2018

tersebut dilakukan Rasulullah dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan anshar. Piagam Madinah sebagaimana dalam sejarah Islam merupakan kebijakan ekonomi yang mengarahkan agar retribusi roda perekonomian di Kota Madinah berjalan. Jangan sampai kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara mereka. Nilai keadilan dan kesejateran dalam konsep perokonomian yang dijalankan oleh Rasulullah dalam menjalankan pemerintah menjadi salah satu hal pokok untuk kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. Contoh Rasulullah sebagai kepala pemerintah dalam menjalankan sesuatu kekuasaan pada waktu itu membawa kejayaan peradaban Islam hingga hari ini. Menjadi pelajaran untuk pemerintah untuk berinovasi demi kesejahteraan rakyat.

BUMDES dalam perkembangan sebagai contoh komitmen dan inovasi pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat. BUMDES dalam pasal 78 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu pembentukan BUMDES bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.⁹ Bila melihat apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan melihat upaya telah pemerintah lakukan saat ini terkhusus apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Enrekang khususnya di Desa Masalle Kecamatan Masalle sudah sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah

BUMDES yang ada di Desa Masalle Kecamatan Masalle untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa Masalle yang pada prinsipnya dijalankan dengan menggunakan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transaparasi, Akuntabel, dan Sustainable, dengan mekanisme self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Selain itu tetap memperhatikan karakteristik lokalitas, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya terkhusus bidang pertanian dan peternakan yang dihasilkan begitupun yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Masalle. Namun di dalam perkembangan pemerintah desa Masalle tetap memiliki berbagai macam kendala dalam mewujudkan BUMDES itu sendiri

D. KESIMPULAN

Kehadiran BUMDES di tengah masyarakat Desa Masalle telah menumbuhkan semangat kewirausahaan yang tinggi di tengah masyarakat desa. Hal ini menjadi motivasi utama bagi masyarakat tumbuh menjadi inovator dan creator dalam bidang usaha terutama usaha yang mengarah kepada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Secara ideal, upaya untuk mengelolah BUMDES melalui jalan usaha sendiri dan semangat berdikari, akan memberi faktor kuat dan pengaruh besar bagi masyarakat desa untuk menikmati kesejahteraan sebagaimana warga desa tetangga mereka. Pola yang dilakukan melalui penumbuhan dan keberpihakan kepada BUMDES, seiring dengan pergerakan Rasulullah pada masa awal untuk memajukan masyarakat Islam Madinah dengan menimbulkan semangat berusaha dan berkompetisi di tengah masyarakat muslim Madinah. Usaha Rasulullah dalam meningkatkan semangat persaudaraan dan persatuan bagi kaum muslimin, termasuk menjadi catatan khusus dalam peningkatan dan optimalisasi BUMDES di Desa Masalle sebab kunci utama keberhasilan badan usaha milik desa untuk memacu semangat keberhasilan bagi masyarakat adalah kekuatan yang erat dalam persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

⁹ (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan : 2007) h.5

Ade Eka Kurniawan. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang bumdes

Depertemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembagunan (PKDSP) fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya , 2007 Buku Panduan Dan Pengelolaan Badan Usaha

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan : 2007) h.5

Samadi dkk. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)

Wawancara RISAL (Ketua BUMDES Desa Masalle).Tanggal 2017; 23 Agustus 2018.

Wawancara SALAMA (Sekertaris Bumdes Desa Masalle),Tanggal; 23 Agustus 2018.

Wawancara dengan SABANG (Anggota Bumdes Desa Masalle) Tanggal 24 Agustus 2018

Wawancara dengan FITRY (Bendahara Bumdes Desa Masalle) Tanggal 23 Agustus 2018

Wawancara dengan SURDIN (Anggota Bumdes Desa Masalle) Tanggal 25 Agustus 2018